



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Maret 2017

Halaman: 13

DID Yogya

Hanya Rp7,5 Miliar

YOGYAKARTA – Suntikan Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemkot Yogyakarta pada tahun ini merosot tajam mencapai 81% dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, suntikan DID dari Kementerian Keuangan pada 2017 ini hanya Rp7,5 miliar. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dua tahun lalu yang mencapai Rp40 miliar.

"Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, anjlok sekitar 81%," ujar Kadri, kemarin.

Kadri mengaku tak mengetahui secara persis apa alasan yang menyebabkan suntikan DID merosot tajam karena Kementerian Keuangan sama sekali tak memberikan penjelasan. Padahal, jika melihat variabel utama agar bisa memperoleh DID, Pemkot berhasil memenuhinya. Yaitu meraih minimal opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas hasil laporan keuangan daerah, dan penyusunan APBD tepat waktu.

Dari Hal 13

"Justru hasil laporan keuangan daerah menunjukkan nilai tertinggi, wajar tanpa pengecualian (WTP)," sebutnya.

Namun demikian, memang ada variabel tambahan yang turut menjadi dasar penilaian oleh pemerintah pusat, diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Meski merosot tajam, lanjutnya, pihaknya tetap akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tergolong bonus dari pusat tersebut. Salah satunya adalah untuk biaya operasional pendidikan berupa pemberian honor bagi tenaga pendidik.

"Kalaupun ini anjlok, berarti pos pendapatan berkurang. Tapi kegiatan tetap jalan karena masih ada pos lain yang bisa dimanfaatkan," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khairi meminta eksekutif meminta penjelasan secara resmi ke Kementerian Keuangan. Apalagi indikator utama untuk memperoleh insentif tersebut mampu terpenuhi.

"Hasil klarifikasi dari Kementerian Keuangan bisa dipakai sebagai bahan evaluasi pembangunan," katanya.

Jika penyebab utama anjloknya DID lantaran indikator tambahan yang tidak sesuai target pemerintah pusat, kata Nasrul, maka tugas kepala daerah untuk menggenjot. Terlebih, untuk pengentasan kemiskinan sudah ada Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) hingga tingkat kelurahan.

ristuhanafi

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005